

Kuesioner *Analytic Hierarchy Process*

Responden yang terhormat, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner yang akan digunakan sebagai bahan penelitian tugas akhir dengan Judul “Penentuan Insentif dan Disinsentif Kawasan Kampung Majapahit Trowulan” berdasarkan pengambilan keputusan pihak pemerintah dan masyarakat. Adapun tujuan dari kuesioner ini yaitu untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu sebagai pihak pemerintah/masyarakat mengenai aspek efektivitas produk pengendalian tata ruang. Hasil kuesioner akan dianalisis dengan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Atas bantuan, ketersediaan waktu dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Instansi/Alamat :

Bidang/Jabatan :

PETUNJUK PENGISIAN

1. Kriteria atau elemen pada setiap level/tingkatan hirarki didefinisikan dan dibatasi oleh penyusunan kuesioner untuk menghindari asumsi yang terlalu luas dan terfokus.
2. Responden diminta untuk memberikan tanggapan/penilaian terhadap setiap perbandingan berpasangan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan intuisi responden selama ini.
3. Tingkat kepentingan yang digunakan dalam kuesioner adalah sebagai berikut:

Intensitas Kepentingan atau Tingkat Preferensi	Definisi	Penjelasan
1	<i>Equal importance</i> (Kedua elemen sama penting)	Dua aktifitas (elemen) memberikan kontribusi sama terhadap tujuan
3	<i>Moderate importance</i> (Elemen yang satu sedikit lebih penting dari yang lain)	Pengalaman dan penilaian memberikan nilai tidak jauh berbeda antara satu aktivitas (elemen) terhadap aktivitas (elemen) lainnya
5	<i>Strong importance</i> (Elemen yang satu lebih penting dari yang lain)	Pengalaman dan penilaian memberikan nilai kuat berbeda antara satu aktivitas (elemen) terhadap aktivitas lainnya
7	<i>Very Strong importance</i> (Elemen yang satu sangat lebih penting dari yang lain)	Satu aktivitas (elemen) sangat lebih disukai dibanding aktivitas (elemen) lainnya
9	<i>Extreme importance</i> (Elemen yang satu mutlak lebih penting dari yang lain)	Satu aktivitas (elemen) secara pasti menempati urutan tertinggi dalam tingkatan preferensi
2, 4, 6, 8	Nilai Kompromi atas nilai-nilai di atas (Nilai tengah antara dua pertimbangan yang berdekatan)	Penilaian Kompromi secara numeris dibutuhkan semenjak tidak ada kata yang tepat untuk menggambarkan tingkat preferensi
Kebalikan (1/2, 1/3...dst)	Jika elemen X mempunyai salah satu nilai diatas pada saat dibandingkan dengan elemen Y, maka elemen Y mempunyai nilai kebalikan jika dibandingkan dengan elemen Y	

9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Elemen X

Elemen Y

Keterangan:

- Angka 1 jika elemen X memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan elemen Y
- Bagian kiri, skala di isi jika elemen X memiliki tingkat kepentingan diatas elemen Y
- Bagian kanan, skala di isi jika elemen Y memiliki tingkat kepentingan diatas elemen X

Berikut merupakan penjelasan dari aspek efektivitas produk pengendalian tata ruang dari Eko Budiharjo (1997) tentang Tata Ruang Perkotaan:

1. Aspek Kebijakan

Berkaitan dengan motivasi produk pengendalian tata ruang, orientasi produk pengendalian tata ruang, kualitas produk pengendalian tata ruang, kelenturan kebijakan produk pengendalian tata ruang, dan keterpaduan produk pengendalian tata ruang.

2. Aspek Politis

Berkaitan dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian ruang serta keterpaduan visi dan misi pembangunan antar sektor pembangunan.

3. Aspek Legal Kontrol

Berkaitan dengan kekuatan hukum produk pengendalian tata ruang dan mekanisme pengawasan dan pengendalian tata ruang.

4. Aspek Sosiokultural

Berkaitan dengan pendekatan sosial budaya dalam pengendalian tata ruang, pemahaman masyarakat dalam pengendalian tata ruang dan sosialisasi produk pengendalian tata ruang.

KUESIONER

Keterangan : Lingkarilah kriteria nilai sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu mengenai tingkat kepentingan antar aspek berikut.

Contoh:

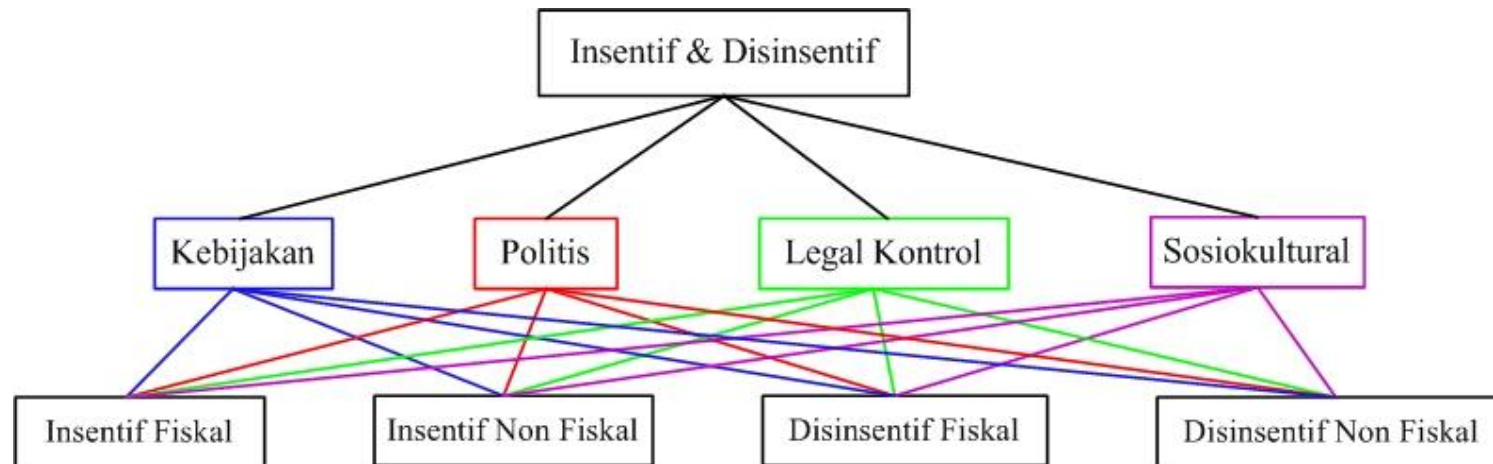
Elemen (Kiri)		Kriteria Nilai																			Elemen (Kanan)
Kebijakan	Berkaitan dengan motivasi produk pengendalian tata ruang, orientasi produk pengendalian tata ruang, kualitas produk pengendalian tata ruang, kelenturan kebijakan produk pengendalian tata ruang, dan keterpaduan produk pengendalian tata ruang	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Berkaitan partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian ruang serta keterpaduan visi dan misi pembangunan antar sektor pembangunan	Politis	

EFEKTIVITAS PRODUK PENGENDALIAN TATA RUANG

Aspek (Kiri)		Kriteria Nilai																			Aspek (Kanan)
Kebijakan	Motivasi produk pengendalian tata ruang, orientasi produk pengendalian tata ruang, kualitas produk pengendalian tata ruang, kelenturan kebijakan produk pengendalian tata ruang, dan keterpaduan produk pengendalian tata ruang	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian ruang serta keterpaduan visi dan misi pembangunan antar sektor pembangunan	Politis	
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kekuatan hukum produk pengendalian tata ruang dan mekanisme pengawasan dan pengendalian tata ruang	Legal Kontrol	
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pendekatan sosial budaya dalam pengendalian tata ruang, pemahaman masyarakat dalam pengendalian tata ruang dan sosialisasi produk pengendalian tata ruang	Sosio kultural	
Politis	Kekuatan hukum produk pengendalian	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kekuatan hukum produk pengendalian tata ruang dan mekanisme pengawasan dan	Legal Kontrol	

Aspek (Kiri)		Kriteria Nilai																		Aspek (Kanan)		
	tata ruang dan mekanisme pengawasan dan pengendalian ruang																				pengendalian tata ruang	
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pendekatan sosial budaya dalam pengendalian tata ruang, pemahaman masyarakat dalam pengendalian tata ruang dan sosialisasi produk pengendalian tata ruang	Sosio kultural		
Legal Kontrol	Kekuatan hukum produk pengendalian tata ruang dan mekanisme pengawasan dan pengendalian ruang	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pendekatan sosial budaya dalam pengendalian tata ruang, pemahaman masyarakat dalam pengendalian tata ruang dan sosialisasi produk pengendalian tata ruang	Sosio kultural		

Berdasarkan aspek efektivitas produk pengendalian tata ruang dapat menentukan prioritas kebijakan Insentif-Disinsentif yang terbagi menjadi empat golongan, antara lain: insentif fiskal, insentif non-fiskal, disinsentif fiskal dan disinsentif non-fiskal.



ASPEK KEBIJAKAN

Aspek ini lebih ditekankan pada kemampuan, kualitas, materi, sifat maupun motivasi/orientasi produk pengendalian tata ruang. Aspek ini memegang peranan dalam menentukan keberhasilan implementasi produk yang berkualitas, terpadu dan memiliki motivasi serta orientasi sebagai salah satu instrumen pengendalian tata ruang.

Aspek (Kiri)		Kriteria Nilai																Aspek (Kanan)		
Insentif Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian keringanan pajak • Pengurangan retribusi 	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan perijinan • Penyediaan sarana-prasarana 	Insentif Non-fiskal
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pengenaan Pajak Tinggi	Disinsentif Fiskal
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban memberi kompensasi • Pembatasan sarana-prasarana • Persyaratan khusus perijinan 	Disinsentif Non-fiskal
Insentif Non-fiskal	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan perijinan • Penyediaan sarana-prasarana 	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pengenaan Pajak Tinggi	Disinsentif Fiskal
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban memberi kompensasi • Pembatasan sarana-prasarana • Persyaratan khusus perijinan 	Disinsentif Non-fiskal
Disinsentif Fiskal	Pengenaan Pajak Tinggi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban memberi kompensasi • Pembatasan sarana-prasarana • Persyaratan khusus perijinan 	Disinsentif Non-fiskal

ASPEK POLITIS

Produk pengendalian tata ruang yang baik sangat memerlukan partisipasi politik dari banyak pihak sehingga banyak alternatif yang mungkin dapat dipertimbangkan.

Aspek (Kiri)		Kriteria Nilai																Aspek (Kanan)		
Insentif Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian keringanan pajak • Pengurangan retribusi 	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan perijinan • Penyediaan sarana-prasarana 	Insentif Non-fiskal
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pengenaan Pajak Tinggi	Disinsentif Fiskal
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban memberi kompensasi • Pembatasan sarana-prasarana • Persyaratan khusus perijinan 	Disinsentif Non-fiskal
Insentif Non-fiskal	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan perijinan • Penyediaan sarana-prasarana 	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pengenaan Pajak Tinggi	Disinsentif Fiskal
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban memberi kompensasi • Pembatasan sarana-prasarana • Persyaratan khusus perijinan 	Disinsentif Non-fiskal
Disinsentif Fiskal	Pengenaan Pajak Tinggi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban memberi kompensasi • Pembatasan sarana-prasarana • Persyaratan khusus perijinan 	Disinsentif Non-fiskal

ASPEK LEGAL KONTROL

Aspek ini meliputi keabsahan suatu produk pengendalian tata ruang secara hukum dan bentuk mekanisme kontrol produk tersebut.

Aspek (Kiri)		Kriteria Nilai																	Aspek (Kanan)	
Insentif Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian keringanan pajak • Pengurangan retribusi 	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan perijinan • Penyediaan sarana-prasarana 	Insentif Non-fiskal
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pengenaan Pajak Tinggi	Disinsentif Fiskal
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban memberi kompensasi • Pembatasan sarana-prasarana • Persyaratan khusus perijinan 	Disinsentif Non-fiskal
Insentif Non-fiskal	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan perijinan • Penyediaan sarana-prasarana 	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pengenaan Pajak Tinggi	Disinsentif Fiskal
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban memberi kompensasi • Pembatasan sarana-prasarana • Persyaratan khusus perijinan 	Disinsentif Non-fiskal
Disinsentif Fiskal	Pengenaan Pajak Tinggi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban memberi kompensasi • Pembatasan sarana-prasarana • Persyaratan khusus perijinan 	Disinsentif Non-fiskal

ASPEK SOSIOKULTURAL

Aspek ini meliputi aspek sosial dan budaya masyarakat yang banyak berpengaruh terhadap penataan ruang kota, melalui peran masyarakat dalam pengendalian tata ruang.

Aspek (Kiri)		Kriteria Nilai																Aspek (Kanan)		
Insentif Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian keringanan pajak • Pengurangan retribusi 	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan perijinan • Penyediaan sarana-prasarana 	Insentif Non-fiskal
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pengenaan Pajak Tinggi	Disinsentif Fiskal
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban memberi kompensasi • Pembatasan sarana-prasarana • Persyaratan khusus perijinan 	Disinsentif Non-fiskal
Insentif Non-fiskal	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan perijinan • Penyediaan sarana-prasarana 	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pengenaan Pajak Tinggi	Disinsentif Fiskal
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban memberi kompensasi • Pembatasan sarana-prasarana • Persyaratan khusus perijinan 	Disinsentif Non-fiskal
Disinsentif Fiskal	Pengenaan Pajak Tinggi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban memberi kompensasi • Pembatasan sarana-prasarana • Persyaratan khusus perijinan 	Disinsentif Non-fiskal

--Terima Kasih--